



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASTUTIN MERDEKAWATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. NHK : 782675

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **124.880.000**

1. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah Seluas 1340 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 109.880.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **49.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI FD110 XCSD Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA NF125 TD MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI KAZE ZX VR/AN130 C Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOBIL, DATSUN GO+PANCA T 1.2 M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **3.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.500.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **178.380.000**

III. HUTANG **Rp.** **208.200.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **-29.820.000**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.